EFEKTIVITAS BELANJA MODAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Muhammad Rifqi Fadilah
NPP. 33.0299
Program Studi Keuangan Publik
Email: m.rigqifafilah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eljawati., S.Sos, MM
Email: eljawati88@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Capital expenditure is expected to support regional development through infrastructure provision and public service improvement. The proportion of capital expenditure in Bandar Lampung City fluctuated during 2020–2024 with an average ratio of 16.04 percent, indicating that the allocation of capital expenditure has not consistently supported regional financial performance. Previous studies mainly examined budget effectiveness from financial ratio perspectives and have not comprehensively explored capital expenditure effectiveness through input, process, and output dimensions in the context of regional financial performance.* ***Purpose:*** *This study aims to know the effectiveness of capital expenditure in improving regional financial performance in Bandar Lampung City.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews, documentation, and literature review. Informants consisted of officials from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Regional Development Planning Agency (Bappeda), Inspectorate, and Procurement Unit (BPBJ) of Bandar Lampung City. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, while effectiveness was examined through the dimensions of input, process, and output proposed by Mahmudi.* ***Result:*** *The findings indicate that capital expenditure effectiveness in Bandar Lampung City is categorized as fairly effective but not yet optimal. The input dimension is constrained by limited budget capacity and technical human resources. The process dimension faces challenges related to technical verification, procurement delays, and inter-agency coordination. The output dimension demonstrates physical realization achievements of approximately 85–90 percent, although project completion timeliness remains inconsistent. Supporting factors include leadership commitment and procurement digitalization. Inhibiting factors include administrative delays and dependence on transfer funds from the central government.* ***Conclusion:*** *Capital expenditure in Bandar Lampung City has been implemented fairly effectively in supporting regional financial performance. Improvements in planning quality, procurement management, and supervision systems are required to optimize development outcomes.*

Keywords: *Capital Expenditure; Effectiveness; Local Financial Governance; Regional Financial Performance; Regional Government.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Belanja modal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Rasio belanja modal Kota Bandar Lampung selama tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 16,04 persen sehingga menunjukkan bahwa alokasi belanja modal belum secara konsisten mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pengukuran efektivitas anggaran berdasarkan rasio keuangan dan belum mengkaji secara komprehensif efektivitas belanja modal melalui dimensi input, proses, dan output dalam kaitannya dengan kinerja keuangan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Bandar Lampung. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan teori efektivitas Mahmudi yang terdiri atas dimensi input, proses, dan output. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal di Kota Bandar Lampung berada pada kategori cukup efektif, tetapi belum optimal. Dimensi input masih menghadapi keterbatasan kapasitas anggaran dan sumber daya manusia teknis. Dimensi proses menghadapi kendala berupa verifikasi teknis, keterlambatan pengadaan, dan koordinasi antar perangkat daerah. Dimensi output menunjukkan capaian realisasi fisik berkisar antara 85–90 persen meskipun ketepatan waktu penyelesaian kegiatan masih belum optimal. Faktor pendorong efektivitas meliputi komitmen pimpinan dan digitalisasi pengadaan. Faktor penghambat meliputi keterlambatan administrasi dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. **Kesimpulan:** Belanja modal di Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup efektif dalam mendukung kinerja keuangan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pengadaan, dan sistem pengawasan diperlukan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan daerah.

Kata kunci: Belanja Modal; Efektivitas; Kinerja Keuangan Daerah; Pemerintah Daerah; Tata Kelola Keuangan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara produktif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam APBD yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan investasi publik yang memberikan manfaat jangka panjang. Pemanfaatan belanja modal yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Optimalisasi Belanja Pemerintah menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus berorientasi pada hasil dan

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja publik, terutama pada komponen belanja modal.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pembangunan infrastruktur dasar, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik memerlukan dukungan alokasi belanja modal yang memadai. Kondisi belanja modal Kota Bandar Lampung selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio (%)
2020	2.127.497.164.301	263.722.501.666	12,40
2021	2.018.391.119.974	400.783.886.158	19,87
2022	2.273.619.562.000	424.750.976.273	18,68
2023	2.277.717.412.233	322.688.320.055	14,69
2024	2.431.818.084.071	353.598.368.982	14,54
Rata-rata	-	-	**16,04**

Sumber: Diolah Penulis, APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa rasio belanja modal Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 16,04 persen. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 19,87 persen, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 14,69 persen dan 14,54 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah belum mengalami peningkatan yang konsisten. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas belanja modal telah mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah.

Pelaksanaan belanja modal juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kompleksitas proses pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian kinerja keuangan daerah. Efektivitas belanja modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja modal memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kajian yang membahas efektivitas belanja modal dalam kaitannya dengan kinerja keuangan daerah masih terbatas, khususnya pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas belanja modal berdasarkan dimensi input, proses, dan output serta kaitannya dengan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian keuangan publik serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan belanja modal yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Belanja modal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui penyediaan infrastruktur, sarana pelayanan publik, dan aset daerah yang memberikan manfaat jangka panjang. Regulasi pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan efisiensi belanja pemerintah menekankan bahwa alokasi belanja modal harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung. Data rasio belanja modal terhadap total belanja daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 16,04 persen. Rasio belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 setelah mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan pembangunan daerah belum selalu diikuti oleh peningkatan proporsi belanja modal secara konsisten.

Kesenjangan juga terlihat dari masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan belanja modal, seperti keterbatasan kapasitas anggaran, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kompleksitas administrasi, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian output pembangunan dan memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara harapan pemerintah untuk mewujudkan belanja modal yang efektif dan berorientasi hasil dengan realitas pelaksanaan belanja modal yang masih menghadapi berbagai hambatan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian mengenai efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena efektivitas belanja modal merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi belanja modal Kota Bandar Lampung yang masih berfluktuasi serta adanya berbagai kendala dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya evaluasi untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kajian ini juga penting untuk memperkaya pengembangan ilmu keuangan publik, khususnya terkait efektivitas pengelolaan belanja modal di daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja modal sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai belanja modal dan kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Abdullah dan Halim (2018) menemukan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang erat dengan sumber pendapatan daerah serta mendukung penyediaan aset yang digunakan dalam pelayanan publik. Antari dan Sedana (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mubarok dkk. (2021) menemukan bahwa belanja modal dan pendapatan transfer pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Insani dan Hendaris (2024) menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel mediasi. Susanti dkk. (2024) juga menemukan bahwa belanja modal menjadi

salah satu faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Rahayu dan Bharata (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan belanja modal pada sektor infrastruktur berada pada kategori cukup efektif. Pasal Bessy dan Setiadi (2023) menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja modal berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kinerja keuangan daerah. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Penelitian yang mengkaji efektivitas belanja modal melalui dimensi input, proses, dan output serta kaitannya dengan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung masih terbatas sehingga menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis efektivitas belanja modal dalam kaitannya dengan kinerja keuangan daerah menggunakan dimensi input, proses, dan output. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengaruh belanja modal terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal, serta pencapaian output pembangunan. Penelitian ini tidak hanya menilai tingkat efektivitas belanja modal, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendorong, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas belanja modal. Kebaruan lainnya terletak pada lokus penelitian, yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai efektivitas pengelolaan belanja modal dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan belanja modal, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kaitannya dengan kinerja keuangan daerah tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan lokus utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Pemilihan lokasi didasarkan pada keterkaitannya dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan belanja modal daerah. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait pengelolaan belanja modal daerah. Informan penelitian terdiri atas sembilan orang, dengan informan kunci yaitu Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan belanja modal. Informan lainnya berasal dari unsur

BPKAD, Bappeda, BPBJ, dan Inspektorat yang terlibat langsung dalam proses penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan belanja modal.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan kinerja pembangunan daerah, serta dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan data pendukung yang diperoleh selama penelitian. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil (Yadav, 1980). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Input

Aspek input dalam efektivitas belanja modal berkaitan dengan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta perencanaan pembangunan. Ketersediaan input yang memadai menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan belanja modal dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Menurut Mahmudi, suatu program dapat berjalan efektif apabila sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketersediaan anggaran belanja modal Kota Bandar Lampung selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan melalui pengadaan aset dan pembangunan infrastruktur daerah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 1.
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024

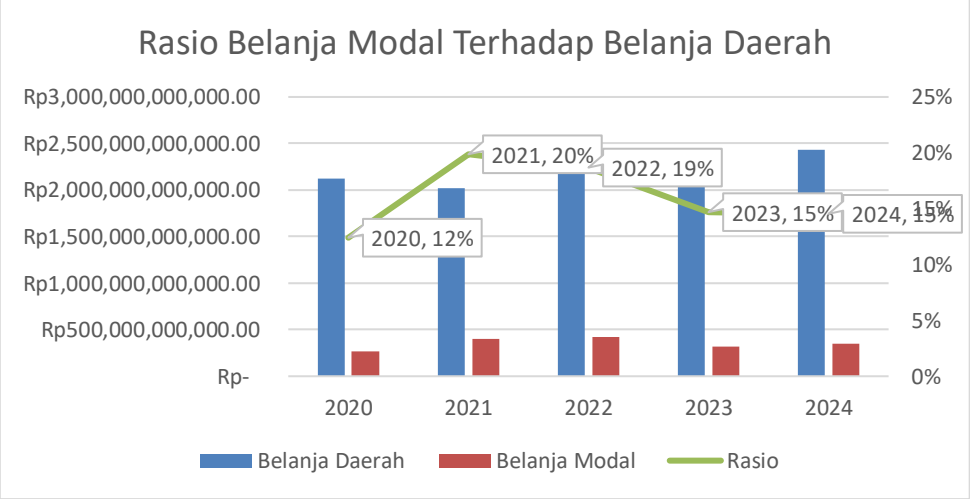

Sumber: Diolah Penulis, APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024

Gambar 1. tersebut menunjukkan bahwa rasio belanja modal Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 16,04 persen selama lima tahun terakhir. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 19,87 persen, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 14,54 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran belanja modal untuk mendukung pembangunan daerah, meskipun proporsinya belum mengalami peningkatan secara konsisten.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Bandar Lampung yang menyatakan: "Belanja modal selalu menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penentuan alokasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang tersedia." Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyediaan anggaran belanja modal telah mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Ketersediaan sumber daya manusia pada perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan juga dinilai cukup mendukung pelaksanaan program pembangunan. Perencanaan belanja modal dilakukan melalui mekanisme perencanaan daerah yang melibatkan berbagai perangkat daerah sehingga kebutuhan pembangunan dapat diakomodasi sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, aspek input dalam pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung dapat dinilai cukup efektif. Ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan perencanaan pembangunan telah mendukung pelaksanaan belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, namun secara umum sumber daya yang tersedia telah mampu mendukung pelaksanaan belanja modal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3.2. Proses

Aspek proses berkaitan dengan tahapan pelaksanaan belanja modal yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan. Menurut

Mahmudi, efektivitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh bagaimana sumber daya tersebut dikelola melalui proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses yang berjalan sesuai prosedur akan meningkatkan peluang tercapainya hasil pembangunan yang optimal.

Pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Perencanaan kegiatan diawali melalui penyusunan dokumen perencanaan daerah yang kemudian diterjemahkan ke dalam APBD. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan yang melibatkan perangkat daerah terkait. Tingkat realisasi belanja modal selama periode penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Realisasi Belanja Modal Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2020	283.564.736.145	263.722.501.666	93,00
2021	427.564.232.450	400.783.886.158	93,74
2022	453.218.905.600	424.750.976.273	93,72
2023	348.717.628.300	322.688.320.055	92,54
2024	382.450.125.700	353.598.368.982	92,45

Sumber: Diolah Penulis, Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024

Tabel 2. tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja modal selama periode 2020–2024 selalu berada di atas 92 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat realisasi anggaran mengindikasikan bahwa proses pelaksanaan belanja modal berjalan relatif baik dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Bandar Lampung yang menyatakan: “Pelaksanaan belanja modal pada prinsipnya telah mengikuti prosedur yang berlaku mulai dari tahap perencanaan hingga pengadaan. Penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa membantu meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan efektivitas proses pelaksanaan belanja modal melalui penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik dan penguatan mekanisme pengawasan. Hasil observasi dan dokumentasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa keterlambatan administrasi, proses verifikasi teknis, dan koordinasi antarperangkat daerah yang menyebabkan sebagian kegiatan mengalami penyesuaian jadwal pelaksanaan.

Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara, dan analisis yang dilakukan, aspek proses dalam pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung dapat dinilai cukup efektif. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai ketentuan dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perbaikan koordinasi dan percepatan penyelesaian administrasi masih diperlukan agar pelaksanaan belanja modal dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap kinerja keuangan daerah.

3.3. Output

Aspek output berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan belanja modal serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Menurut Mahmudi, output merupakan produk atau hasil langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Efektivitas pada aspek output dapat dilihat dari tingkat pencapaian target pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung telah menghasilkan berbagai pembangunan aset dan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik serta aktivitas pemerintahan daerah. Pembangunan tersebut meliputi sarana transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Hasil pembangunan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan belanja modal dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melihat hasil pelaksanaan belanja modal, dapat diperhatikan data realisasi fisik kegiatan pembangunan berikut.

Tabel 3.

Capaian Realisasi Fisik Kegiatan Belanja Modal Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024

Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
2020	100	85
2021	100	90
2022	100	89
2023	100	87
2024	100	88

Sumber: Diolah Penulis dari Data Pemerintah Kota Bandar Lampung

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi fisik kegiatan belanja modal selama periode 2020–2024 berada pada kisaran 85–90 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tingkat realisasi yang relatif tinggi menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang direncanakan telah berhasil diwujudkan meskipun belum mencapai target secara penuh.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan dari Bappeda Kota Bandar Lampung yang menyatakan:“Belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah telah menghasilkan berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung pelayanan masyarakat. Hasil pembangunan tersebut secara bertahap memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa output yang dihasilkan dari belanja modal tidak hanya berupa aset fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa berbagai sarana dan prasarana yang dibangun melalui belanja modal telah dimanfaatkan oleh masyarakat serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan daerah juga menunjukkan hubungan dengan pelaksanaan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi. Dampak tersebut tidak selalu terlihat secara langsung pada peningkatan pendapatan daerah dalam jangka pendek, namun memberikan manfaat jangka panjang melalui peningkatan produktivitas daerah, nilai aset pemerintah, dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi, wawancara, dan analisis yang dilakukan, aspek output dalam pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung dapat dinilai cukup efektif. Hasil pembangunan yang dicapai telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Realisasi fisik kegiatan yang berada pada kisaran 85–90 persen menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan berhasil dicapai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal telah berkontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penyediaan aset dan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung berada pada kategori cukup efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan belanja modal, proses pengelolaan yang berjalan sesuai ketentuan, serta output pembangunan yang mampu mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah telah menghasilkan berbagai aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung aktivitas pemerintahan daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan belanja modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdullah dan Halim (2018) yang menjelaskan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah serta penyediaan aset yang mendukung pelayanan publik. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Antari dan Sedana (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa belanja modal yang dikelola secara efektif mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mubarok dkk. (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Insani dan Hendaris (2024) yang menunjukkan bahwa belanja modal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah melalui penguatan kapasitas fiskal dan pengembangan aset daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya realisasi anggaran belanja modal tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah dalam jangka pendek. Manfaat belanja modal lebih banyak dirasakan dalam jangka menengah dan jangka panjang melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan nilai aset pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat penelitian Susanti dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah memerlukan waktu karena manfaat pembangunan baru dapat dirasakan setelah aset dan infrastruktur digunakan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung masih menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari adanya keterlambatan pada beberapa kegiatan pembangunan dan belum tercapainya seluruh target fisik kegiatan secara sempurna.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu dan Bharata (2021) yang menemukan bahwa efektivitas belanja modal pada sektor infrastruktur masih menghadapi berbagai kendala dalam pencapaian target pembangunan. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan belanja modal di Kota Bandar Lampung tetap mampu menghasilkan output pembangunan yang cukup baik sehingga efektivitasnya berada pada kategori cukup efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan utama penelitian, yaitu:

a. Belanja modal di Kota Bandar Lampung telah didukung oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan perencanaan pembangunan yang cukup memadai.

b. Proses pelaksanaan belanja modal telah berjalan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi.

c. Belanja modal menghasilkan berbagai pembangunan infrastruktur dan aset daerah yang mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Kontribusi belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah lebih banyak dirasakan dalam jangka menengah dan jangka panjang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, aset daerah, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

e. Efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung berada pada kategori cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan agar hasil pembangunan dapat dicapai secara lebih optimal.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjadikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan daerah merupakan salah satu faktor yang mendukung efektivitas belanja modal. Dukungan tersebut terlihat dari konsistensi pengalokasian belanja modal dalam APBD serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa yang membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan belanja modal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan pemerintah daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan kendala administratif pada beberapa tahapan pelaksanaan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan belanja modal. Kebutuhan pembangunan yang terus meningkat menyebabkan pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran. Proses verifikasi administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi antarperangkat daerah juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa manfaat belanja modal lebih banyak dirasakan dalam jangka menengah dan jangka panjang melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan nilai aset daerah, sehingga kontribusinya terhadap kinerja keuangan daerah tidak selalu terlihat secara langsung pada tahun anggaran yang sama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung berada pada kategori cukup efektif. Efektivitas tersebut ditunjukkan oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan belanja

modal, proses pengelolaan yang berjalan sesuai ketentuan, serta output pembangunan yang mampu mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja modal telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset daerah yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada kajian efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada aspek input, proses, dan output sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah daerah yang memiliki karakteristik berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian pada beberapa pemerintah daerah serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, dosen pembimbing, keluarga, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dukungan dan bantuan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., & Halim, A. (2018). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571

Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen, 7*(2), 1080–1110. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2020). Regional financial performance and capital expenditure allocation in local governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 12*(2), 108–118. https://doi.org/10.15294/jda.v12i2.24435

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. New York: Routledge.

Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Esterberg, K. G. (2002). Qualitative Methods in Social Research. New York: McGraw-Hill.

Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Huda, N. (2024). The characteristics and financial performance of local governments in Indonesia. *Accounting Analysis Journal, 13*(2). https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.1894

Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Hutauruk, M. M. (2024). Pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(3), 42932–42939. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i3.20606

Insani, F. A., & Hendaris, R. B. (2024). The effect of capital expenditure on regional financial performance with regional original income as a mediation variable. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 8*(2). https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.13980

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2021). Local government financial performance: The effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 9*(6). https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia

Oates, W. E. (2021). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. In Institutional Foundations of Public Finance (pp. 165–189). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.2307/j.ctv1nzfgfp.14

Pasal Bessy, A. D., & Setiadi, P. B. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Efektivitas dan Efisiensi Manajemen serta Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Cakrawala Repositori IMWI, 6(2), 1216–1227. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.270

Prasetyo, A., & Zuhdi, U. (2013). The government expenditure efficiency towards the human development. Procedia Economics and Finance, 5, 615–622. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00072-5

Putri, M., & Aswar, K. (2022). Local government financial performance: The role of political monitoring. Journal of Economics and Behavioral Studies, 14(3), 42–50. https://doi.org/10.22610/jebs.v14i3(J).3307

Rahayu, A. S. (2022). Pengantar pemerintahan daerah: Kajian teori, hukum, dan aplikasinya. Sinar Grafika.

Rahayu, W. S., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas Belanja Modal pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang. ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal, 2(1), 12–16. https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.225

Sania, A. W., & Shinta, P. S. (2024). Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung: Amatan terhadap Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 289–307.

Sari, M. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen, 8*(3), 1749–1776. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i03.p14

Setyosari, P. (2013). Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: Kencana.

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan. Alfabeta.

Sinurat, M. (2018). Akuntansi keuangan daerah. Ghalia Indonesia.

Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the Public Sector (4th ed.). New York: W.W. Norton & Company.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Susanti, S., Sam, I., & Yudi, Y. (2024). The influence of capital expenditure, economic growth, and fiscal stress on local government financial performance. *Jurnal Cakrawala Akuntansi, 17*(1). https://doi.org/10.22437/jca.v17i1.46767

Sutisman, E., Prasetianingrum, S., Sutisna, E., Noy, I. R., Darmayanti, N., & Fahreza, E. R. N. (2024). The effect of capital expenditure, balancing funds, regional original revenue and e-government on local government financial performance. *Journal of Tourism Economics and Policy, 4*(4). https://doi.org/10.38142/jtep.v4i4.1170

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (Edisi 11). Jakarta: Erlangga.

Zaenudin, Z., & Hamdani, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(3), 1306–1320. https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.897

Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of local government financial performance in Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 12(5), 332–347. https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148